

## Yang Terdampak pada Teriak

Kebijakan efisiensi anggaran membuat wisata di Kaltim redup. Itu karena sejak awal tahun, banyak perjalanan dinas yang menjadi salah satu penyumbang tingkat kunjungan wisata dibatalkan. Belum lagi perkembangan ekonomi yang belum membaik, membuat masyarakat cenderung berhemat. Kalaupun berlibur, hanya ke tempat-tempat yang terjangkau.

“Sejak efisiensi anggaran khususnya perjalanan dinas dipangkas, kondisi wisata Kaltim meredup. Di libur lebaran ini seharusnya bisa mendongkrak kunjungan dan okupansi hotel. Sayangnya kondisinya tidak seramai tahun lalu,” ucap Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Balikpapan Joko Purwanto.

Hingga di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jadi destinasi wisata, Otorita IKN mencatat lebih dari 64 ribu kunjungan ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 27 Maret - 5 April 2025.

Adapun salah satu tempat wisata yang dikelola kelompok masyarakat yang juga menerima berkah libur lebaran ada di Ekowisata Bamboe Wanadesa, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Dalam kunjungan Kaltim Post pada Sabtu (5/4) sore, suasana di areal tanaman bambu seluas 3,6 hektare ramai pengunjung. Didominasi wisatawan lokal. Mereka menikmati berbagai fasilitas.

“*Alhamdulillah* Idulfitri tahun ini, kunjungan meningkat hingga 120 persen. Rerata kami menerima 500-600 orang,” ucap Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata Bamboe Wanadesa, Murdiyanto.

Pria yang menginisiasi terbentuknya ekowisata di kawasan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kampung Pati, Jalan Giri Rejo, RT 26 tersebut menjelaskan, peningkatan fasilitas dilakukan pihaknya selaku pengelola.

Mulai gazebo, perahu wisata, arena bermain anak hingga menjaga kebersihan di jalur pejalan kaki di bawah rimbunnya bambu. Meski terjadi peningkatan fasilitas, namun secara tarif, tiket yang dikenakan ke pengunjung tak berubah. Tetap Rp5 ribu per orang. Baik dewasa maupun anak-anak.

“Areal kuliner juga kami buka pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu di dalam lokasi wisata ini. Kami juga dapat bantuan bibit pohon buah. Jadi ke depan ada wisata buahnya juga,” sebutnya. Adapun asal wisatawan, Murdiyanto menyebut kebanyakan dari Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya. Namun ada juga yang datang dari Berau. Selain wisata alam, lokasi ini juga biasa dijadikan arena berkemah hingga *event* organisasi dan perusahaan.

## DIPREDIKSI MENURUN

Meski libur lebaran kali ini lebih panjang, namun kunjungan tempat wisata di Kaltim diprediksi menurun. Sejumlah faktor mengemuka. Mulai dampak kebijakan diskon tiket pesawat, efisiensi anggaran, hingga lesunya ekonomi, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Termasuk pengaruh dari cuaca yang belakangan kurang bersahabat untuk kegiatan di luar ruangan. Hal tersebut sudah bisa dirasakan jauh hari sebelum momentum libur Idulfitri.

“Memang awalnya kami memperkirakan akan ada kenaikan wisatawan di sejumlah destinasi. Namun hingga hari ini (Jumat 4/4) dari perhitungan kami pada 2-6 April (masa puncak libur lebaran), kami memperkirakan, mudah-mudahan tidak, tetapi sepertinya ada penurunan,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim Restiawan Baihaqi kepada Kaltim Post.

Eki, sapaan akrabnya menyebut, prediksi itu lebih disebabkan sejumlah kebijakan pusat terkait diskon terkait pesawat. Sehingga banyak masyarakat terutama pekerja yang lebih memilih untuk mudik ke kampung halaman atau berlibur di luar daerah dibandingkan menghabiskan waktu untuk liburan di Kaltim.

Karena itu, meski secara arus kunjungan sejumlah lokasi wisata meningkat dibandingkan hari biasa, namun secara keseluruhan diperkirakan akan terjadi penurunan.

“Belum lagi ditambah dengan faktor cuaca ya. Karena kita lihat belakangan cuaca kurang mendukung utamanya pagi. Namun ini masih ada waktu pada Sabtu dan Minggu. Semoga cuacanya baik. Sehingga masyarakat tidak terhalang untuk berwisata dan menambah tingkat kunjungan ke tempat wisata,” sebut Eki.

Secara data, hingga 4 April lalu, Eki menyebut pihaknya belum menerima secara utuh berapa jumlah kunjungan dari pengelola wisata. Adapun biasanya, dalam libur lebaran ada sekitar 80 destinasi wisata yang akan mengirimkan laporannya ke Dispar Kaltim.

“Sementara baru masuk dari Kubar. Di sana ada 12 wisata dari alam hingga budaya. Namun data yang baru masuk sementara menunjukkan kunjungan tertinggi pada H+1 Idulfitri. Terbanyak di wisata Jantur Mapan ada 300 wisatawan Nusantara,” ucap Eki.

Adapun data lain yang diterima berasal dari wisata *Lake View* Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Di mana dari 31 Maret terjadi lonjakan signifikan kunjungan hingga 4 April lalu.

Dari total 900 pengunjung meningkat ke 3.122 hingga mendekati 5 ribu wisatawan. Itu tercatat dari jumlah tiket yang terjual. Sementara di Museum Mulawarman di Tenggarong, Kukar, kunjungan meningkat dibanding hari biasa.

Dari 100-150 tiket yang terjual, di H+2 dan H+3 Idulfitri, rerata terjual hingga 500 tiket masuk. Termasuk wisata Beras Basah di Bontang. Data terakhir yang diterimanya, sudah ada 1.400-1.500 kunjungan.

“Di Balikpapan ada Pantai Manggar dan Lamaru. Kami catat di Manggar sampai 12 ribuan pengunjung. Namun pada periode yang sama lebaran tahun lalu, angka itu cukup menurun. Karena tahun lalu bisa mencapai 24 ribuan pengunjung. Sekali lagi semoga angka tahun ini bisa meningkat melihat sisa hari libur yang masih ada,” jelasnya.

Soal dampak efisiensi anggaran, Eki menyebut tidak terlalu berpengaruh. Karena kebijakan tersebut baru diambil pada awal tahun lalu. Sementara masyarakat biasanya sudah menyiapkan dana sebelumnya untuk keperluan berwisata di libur lebaran. Meski sebelumnya ada momen Tahun Baru yang jaraknya dekat dengan Idulfitri.

“Jadi uangnya terserap ke sana (tahun baru). Kalaupun ada pengaruh efisiensi lebih kepada pilihan ke mana lokasi wisata yang lebih terjangkau saja atau karena momen misal karena harga tiket pesawat murah, ingin liburan ke luar Kaltim. Tapi untuk selebihnya, momen libur menghabiskan waktu bersama keluarga tetap diutamakan masyarakat,” beber Eki.

Sebelumnya, Dispar Kaltim sendiri menargetkan 6,9 juta kunjungan wisatawan Nusantara (Wisnus) pada 2025. Selain itu, tahun ini juga Dispar menargetkan dikunjungi sebanyak 18 ribu wisatawan mancanegara (Wisman).

Adapun untuk mencapai target kunjungan tersebut, Eki menyebut pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan menggencarkan MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*). Dengan harapan, punya efek domino. Tidak hanya kepada sektor pariwisata, namun juga UMKM dan sektor perhotelan.

“Berbagai promosi kegiatan dan wisata pun sudah kami dorong sejak awal tahun. Menggandeng berbagai organisasi dan lintas sektor. Dengan efisiensi ini, kami mendorong juga agar masyarakat Kaltim tetap wisata di Kaltim saja,” ucapnya.

Di sisi lain, dirinya berharap semakin banyak rute penerbangan yang tersedia untuk meningkatkan wisman. Seperti teranyar rute Balikpapan-Brunei Darussalam di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian Balikpapan.

## **OKUPANSI TURUN**

Meski baru prediksi, sektor pariwisata disebut bakal mengalami penurunan nyatanya sudah dirasakan di sektor perhotelan. Di mana sejak awal tahun hingga libur lebaran ini mengalami kelesuan. Sejak kebijakan efisiensi anggaran digelontorkan pemerintah. Di mana di libur lebaran 2025 ini, okupansi hotel di Kaltim disebut-sebut turun 10 persen dibandingkan pada lebaran tahun lalu. Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Sahmal Ruhip menyebut, meski ada peningkatan okupansi pada libur lebaran 2025 dibandingkan pada hari biasa, namun kecenderungan turun dibandingkan periode Idulfitri 2024 lalu.

“Libur lebaran ini kan sifatnya hotel kedatangan 'tamu kaget'. Dibandingkan tahun lalu, ada penurunan okupansi mencapai 10 persen. Di mana rerata okupansi hotel ada di angka 40-50 persen. Lebih tinggi dibandingkan saat Ramadan yang hanya 15-20 persen,” ucap Sahmal, Sabtu (5/4).

Dirinya menyebut, faktor ekonomi masyarakat menjadi penyebabnya. Pasalnya, di tengah situasi lemahnya daya beli masyarakat saat ini, sebagian akan menunda untuk

menghabiskan uangnya untuk kegiatan yang cenderung menguras tabungan. Termasuk dirinya, yang memilih tidak mudik lantaran masih tingginya harga tiket pesawat.

“Kebijakan diskon tiket pesawat sangat terbatas. Belum lagi tidak adanya *extra flight* ke daerah tertentu. Membuat banyak orang termasuk saya tidak merasakan dampak kebijakan diskon tiket itu. Jadi saya dan keluarga lebih memilih di Kaltim saja,” ungkap pria asal Bengkulu tersebut.

Selain lemahnya daya beli masyarakat, faktor utama kelesuan industri perhotelan adalah kebijakan efisiensi anggaran dan larangan acara hingga seremonial di hotel. Itu, kata dia, yang membuat okupansi hotel anjlok. Hingga di bawah 50 persen. Namun kondisi itu disebutkan belum sampai pada rencana pengusaha untuk merumahkan karyawan.

“Kalau ada isu PHK (pemutusan hubungan kerja) itu tidak benar. Kami sifatnya lebih kepada pengaturan jam kerja saja. Sama kondisinya saat Covid-19 lalu. Di mana yang diatur hanya waktu kerja karyawan, tidak sampai pada pengurangan,” ucap Sahmal.

Dirinya mengungkapkan, saat ini dunia perhotelan memang dalam kondisi lesu tetapi masih bertahan. Setiap pelakunya masih menunggu 1 harapan. Di mana PHRI pusat sedang berjuang agar kebijakan pemerintah terkait efisiensi itu tidak berlanjut terus menerus.

Utamanya yang menasar langsung pada sektor perhotelan. Berbagai pertemuan dengan kementerian dan DPR RI pun disebutkan masih terus dilakukan.

“Rapat PHRI di Bogor, akan bertemu DPR RI untuk menekan Presiden. Kami tunggu sampai pertengahan tahun ini, minimal Mei semoga ada kabar. Kami tidak menginginkan ada kompensasi atau semacamnya. Cukup ucapan saja dari Kepala Negara atau Kepala Daerah. Yang tidak melarang kegiatan di hotel. Itu saja,” tuturnya.

Kata Sahmal, lobi-lobi kepada Kepala daerah sudah dilakukan. Sayangnya, seperti di Kaltim pengambil kebijakan cenderung bersikeras sementara di tengah efisiensi melarang kegiatan pemerintahan di hotel.

Bahkan mengeluarkan edaran larangan adanya kegiatan termasuk wisuda sekolah di hotel. Itu sangat salah hingga berpotensi memengaruhi sektor swasta lain.

“Seharusnya pemerintah tidak perlu ikut campur soal kegiatan sekolah. Bahkan di Balikpapan itu sampai ada sekolah yang sudah bayar uang muka perpisahan sekolah tapi ujungnya minta dibatalkan. Kan tidak mungkin hotel mengembalikan uang muka yang sudah dibayar,” ujarnya.

Saat ini, Sahmal mengibaratkan pelaku usaha perhotelan dalam kondisi siaga. Dirinya menyebut, jika kondisinya semakin buruk bagi industri, pelaku bisnis perhotelan bisa saja melakukan berbagai upaya agar bisa bertahan.

Mulai mengalihkan bisnis yang lebih menjanjikan, hingga terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Di sisi lain upaya lain adalah demonstrasi hingga mogok operasi. Kata dia, bisa saja itu terjadi.

“Kalau kami sudah baik-baik tidak didengar bisa saja kami kasih syok terapi. Demo misalnya, tutup hotel se-Kaltim tiga hari. Apa enggak 'bengek' juga tamu. Itu sudah saya sampaikan ke DPC di Kaltim. Kalau negosiasi baik-baik tidak bisa dilakukan, bisa saja kami kasih syok terapi. Itu pernah terjadi di Makassar. Ingat hotel tidak pernah merugikan Kaltim, justru semakin maju kami, semakin besar PAD (pendapatan asli daerah) yang diterima pemerintah,” tegasnya. **(rd)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Yang Terdampak pada Teriak, 06/04/2025

#### **Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya bahwa kepariwisataannya bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. menghapus kemiskinan;
  - d. mengatasi pengangguran;
  - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
  - f. memajukan kebudayaan;
  - g. mengangkat citra bangsa;
  - h. memupuk rasa cinta tanah air;
  - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
  - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Perda Provinsi Kaltim 5/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Sasaran pembangunan kepariwisataannya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
    - a. peningkatan minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
    - b. pengembangan destinasi pariwisata utama sebagai daya tarik wisata unggulan daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
    - c. pengembangan destinasi pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang destinasi pariwisata utama; peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataannya; dan
    - d. keseimbangan pembangunan kepariwisataannya dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah daerah.
  - (2) Capaian sasaran pembangunan kepariwisataannya daerah diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, dan produk domestik

regional bruto daerah dari pariwisata yang tercantum dalam lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Dalam Pasal 25 Perda Provinsi Kaltim 5/2022 diatur bahwa strategi pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. penguatan citra destinasi wisata;
  - b. diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata;
  - c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
  - d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.
4. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diatur sebagai berikut:
  - (1) Objek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
  - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.